

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH DALAM RANGKA STABILISASI HARGA BARANG
KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

2026

PERBUP WONOSOBO NO. 1, BD.2026/No.1, 6 HLM

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PASAR MURAH
DALAM RANGKA STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

- ABSTRAK :
- Pasar Murah dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan dan perkembangan perubahan ketersediaan dan harga komoditas kebutuhan pokok Masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat serta menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Kabupaten Wonosobo.
 - Dasar Hukum Peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No.13 Tahun 1950, UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 12 Tahun 2019, Perda Kab Wonosobo No. 2 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan Pasar Murah melalui tim penyelenggara yang dibentuk oleh Bupati. Sasaran Penyelenggaraan Pasar Murah merupakan masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat inflasi di Daerah meliputi buruh tani, buruh pabrik, pedagang kaki lima, buruh gendong, pekerja dengan penghasilan tidak tetap serta kelompok masyarakat rentan lainnya. Pemerintah Daerah mendistribusikan kupon kepada pemerintah Desa/Kelurahan/orang yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dengan sejumlah kuota yang telah ditetapkan. Pemerintah Desa/Kelurahan/orang tersebut kemudian mendistribusikan kupon kepada sasaran masyarakat yang terdampak. Adapun jenis komoditas yang disediakan untuk kegiatan Pasar Murah berupa Barang Kebutuhan Pokok meliputi beras premium produksi dalam negeri, gula kristal putih bukan rafinasi dan minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai Standar Nasional Indonesia. Selain itu biaya penyelenggaraan Pasar Murah bersumber dari APBD.
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 8 Januari 2026.
 - Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 5 Tahun 2025.